



Perkembangan Bahasa Indonesia—Melayu di Indonesia dalam Konteks Sistem Pendidikan

Maman S. Mahayana *)

*) Penulis adalah dosen tetap Fakultas Ilmu Budaya di Universitas Indonesia, sedang menempuh Program Doktor di Malaysia.

Abstract: The long history of Malayan-Indonesia language often can't be separated from many political interest of state. moreover, after juridical legitimated in UUD 1945 as State Language, Indonesian language act as state language, national language, union language, official language, interrelation language in every side of people. Therefore, Indonesian language become un-separated part of Indonesian nation's life. Meanwhile, because Indonesian language rooted from Malayan language, an effort to unite similarity with language in ASEAN (south East Asia) region, as Malaysia, Singapore, and Brunei Darussalam language, isn't a meaningless task. In fact, to prevent misunderstanding between nations, this effort is a necessary. **Keywords:** *Language, Indonesia, Melayu, Education system.*

Pengantar

Bahwa asal bahasa Indonesia ialah bahasa Melayu. Dasar bahasa Indonesia ialah bahasa Melayu yang disesuaikan dengan pertumbuhannya dalam masyarakat Indonesia sekarang.

Itulah pernyataan butir 8 Keputusan Seksi A dalam Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan yang berlangsung 28 Oktober—2 November 1954. Keputusan itu, secara eksplisit menegaskan kembali bahasa Melayu sebagai asal dan dasar bahasa Indonesia. Dengan demikian, pembicaraan mengenai “Perkembangan Bahasa Indonesia-Melayu di Indonesia dalam Konteks Sistem Pendidikan” tentu saja tidak dapat melepaskan diri dari proses perjalanan bahasa Indonesia, sebelum dan sesudah Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928, saat bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa Indonesia.

Menempatkan sebuah bahasa menjadi salah satu mata pelajaran dalam sistem pendidikan, tentu saja tidak hanya karena pentingnya kedudukan bahasa itu dalam satu komunitas, tetapi juga karena didasari tujuan lain yang melatarbelakanginya. Paling tidak, ada empat tujuan yang hendak dicapai ketika sebuah bahasa tertentu dijadikan sebagai mata pelajaran dalam institusi pendidikan. Pertama, untuk tujuan praktis, yaitu sebagai sarana untuk berkomunikasi dalam pergaulan keseharian,¹ mengangkat status sosial,² atau bahkan untuk mengejar karier. Kedua, untuk tujuan teoretis yang berkaitan dengan kepentingan ilmu pengetahuan.³ Ketiga, untuk tujuan pengembangan bahasa itu sendiri,⁴ dan keempat untuk tujuan politik atau yang berkaitan dengan soal nasionalisme.⁵

Bahasa Melayu yang mempunyai sejarah panjang sebagai *lingua franca* di kepulauan Nusantara, dijadikan sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah dalam sistem pendidikan kolonial, juga dengan keempat tujuan itu.⁶ Mari kita telusuri perjalanannya.



Sejarah Penggunaan Bahasa Melayu

Ketika dunia persekolahan belum dikenal masyarakat di wilayah Nusantara ini, orang dengan latarbelakang etnis lain, pada mulanya belajar bahasa Melayu sekadar untuk tujuan praktis, yaitu agar dapat berkomunikasi, baik dengan penduduk Melayu sendiri, maupun etnis-etnis lain yang non-Melayu. Pandangan ini juga disadari benar oleh orang asing yang datang ke wilayah Nusantara. Para pedagang dan missionaris lebih memilih belajar dan mempelajari bahasa Melayu daripada bahasa daerah lain, mengingat bahasa Melayu –sebagai *lingua franca*—sudah dikenal luas penduduk dan menyebar ke berbagai pelosok Nusantara. Sejumlah prasasti dan bukti lain yang menyatakan hal tersebut dengan mudah dapat kita sebutkan.⁷

Jauh sebelum bangsa Belanda datang ke wilayah Nusantara, bahasa Melayu sudah dipergunakan sebagai bahasa penghubung dan bahasa perniagaan yang penyebarannya telah melewati wilayah Nusantara. Bahkan, orang-orang Portugis yang hendak berniaga, menekankan pentingnya pengetahuan bahasa Melayu jika ingin mencapai hasil yang baik dalam perniagaannya. Bahasa Melayu yang disebutnya sebagai bahasa Latin dari Timur, digunakan untuk kepentingan praktis, yaitu menyampaikan misi agama, perdagangan dan niaga, dan pendidikan yang berhubungan dengan itu.⁸

Menjelang akhir abad ke-16, Jan Huygen van Linschoten selepas kunjungannya ke wilayah Nusantara, menyatakan bahwa bahasa Melayu telah sedemikian masyhurnya di kawasan ini. Lebih daripada itu, bahasa Melayu telah dianggap sebagai bahasa yang sehumat-hormatnya dan sebaik-baiknya dari segala bahasa di Timur.⁹ Dalam *Itinerario* (1596), Linschoten menyatakan bahwa “yang tidak berbahasa Melayu di Hindia-Belanda, dia tidak bisa turut serta seperti bahasa Perancis untuk kita.”¹⁰ Selanjutnya, dikatakan bahwa pada tahun 1596, bahasa Melayu merupakan bahasa hasil ramuan, tetapi pada akhir abad ke-16, bahasa ini telah demikian maju sehingga menjadi bahasa budaya dan perhubungan. Oleh karena itu, seperti dikutip A. Teeuw,¹¹ “Setiap orang yang ingin ikut serta dalam kehidupan antarbangsa di kawasan itu mutlak perlu mengetahui bahasa Melayu.”

Di dalam Gambaran tentang Malaka (*Beschrijvinghe van Malakka*), pendeta Francois Valentijn¹² yang bertugas di Ambon selama lebih dari dua windu (1685—1695 dan kembali lagi ke Ambon 1707—1713) mengungkapkan pandangannya tentang bahasa Melayu pada masa itu sebagai berikut:

*Bahasa mereka disebut bahasa Melayu...Bahasa ini tidak hanya dipergunakan di daerah mereka, tetapi juga dipergunakan di mana-mana untuk bisa saling mengerti dan untuk dipakai di mana pun di seluruh Hindia, dan di semua negara di Timur, seperti halnya dengan bahasa Perancis atau Latin di Eropa ... orang yang bisa bahasa itu tidak akan kebingungan karena bahasa ini dikenal sampai dimengerti. Orang yang tidak bisa berbicara bahasa ini akan dianggap sebagai orang Timur yang kurang pendidikan.*¹³

Sebelumnya, Valentijn juga mengungkapkan pandangannya yang positif mengenai bahasa Melayu: “Bahasa itu indah, bagus sekali, merdu bunyinya, dan kaya, yang di samping bahasa Portugis, merupakan bahasa yang dapat dipakai di seluruh Hindia sampai ke Parsi, Hindustan, dan negeri Cina.”¹⁴ Begitu pentingnya bahasa Melayu di kawasan ini sehingga—seperti tampak dari pernyataan Valentijn—pujian terhadap bahasa Melayu terkadang terkesan berlebihan. Meskipun demikian,



pandangan orang-orang asing itu didasarkan pada fakta bahwa dibandingkan dengan bahasa daerah lain yang tersebar di kepulauan Nusantara ini, bahasa Melayu justru sudah begitu dikenal luas, baik oleh penduduk pribumi dari etnis-etnis non-Melayu, maupun orang asing yang datang ke kepulauan ini. Hal itu dikatakan pula oleh Gubernur Jenderal J.J. Rochussen (1845—1851) setelah ia melakukan perjalanan mengelilingi Pulau Jawa pada tahun 1850.

*Bahasa Melayu itu lingua franca seluruh kepulauan Hindia ini, bahasa yang dipakai oleh sekalian orang yang masuk golongan bermacam-macam bangsa dalam pergaulannya bersama: orang Melayu dengan orang Jawa, orang Arab dengan orang Tionghoa, orang Bugis dengan orang Makasar, orang Bali dengan orang Dayak.*¹⁵

Demikianlah, orang asing, dan terutama bangsa Eropa yang datang ke Nusantara, mempelajari bahasa Melayu. Pada awalnya, mereka lebih menekankan pada tujuan praktis, yaitu sebagai sarana untuk mempermudah berkomunikasi dengan penduduk pribumi. Dalam perkembangannya, mengingat bangsa Eropa, khususnya Belanda, mempunyai kepentingan tertentu dalam menjalankan politik kolonial, maka pandangan terhadap bahasa Melayu tidak lagi sekadar untuk berkomunikasi, tetapi untuk melanggengkan kekuasaannya. Atas dasar kenyataan itu, tidak dapat lain penguasaan bahasa Melayu menjadi salah satu syarat penting bagi pejabat pemerintah yang hendak bertugas di wilayah ini. Dalam hal itulah, kedudukan bahasa Melayu di wilayah Nusantara menjadi makin penting dipelajari. Untuk mewujudkan gagasan itu, Gubernur Jenderal J.J. van Rochussen mengusulkan agar bahasa Melayu ditetapkan sebagai bahasa pengantar yang dipakai di kepulauan Nusantara. Gagasannya ini tentu saja makin mempercepat penyebaran bahasa Melayu bagi penduduk dan orang-orang asing yang datang ke wilayah ini.

Sementara itu, masuknya pengaruh Islam ke Nusantara, jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa, menyertakan pula tradisi penulisan huruf Jawi,¹⁶ Pegon,¹⁷ atau yang lebih umum dikenal dengan huruf Arab—Melayu.¹⁸ Dalam hal ini, meskipun masyarakat di beberapa daerah, sudah mengenal dan menggunakan huruf daerahnya, tetapi mereka menerima juga huruf Arab untuk menulis bahasa daerahnya. Itulah sebabnya, ketika orang-orang Eropa memperkenalkan huruf Latin, huruf-huruf itu tidak serta-merta diterima begitu saja.¹⁹ Bagi orang-orang Eropa, khususnya Belanda, penulisan bahasa Melayu dengan huruf Arab menimbulkan masalah tersendiri. Mereka lebih mudah belajar bahasa Melayu dengan huruf Latin daripada dengan huruf Arab. Seperti dikatakan van Ronkel berikut ini: “*Berbicara dalam bahasa Melayu merupakan hal biasa bagi kami. ...sayangnya orang Belanda yang dapat “membaca” (mengerti huruf Arab) masih sangat langka.*”²⁰ Dengan demikian, saat itu, komunikasi tertulis dalam bahasa Melayu yang dilakukan orang-orang Eropa dengan penduduk pribumi terutama golongan bangsawan dan raja-raja, lebih banyak menggunakan huruf Latin. Sebaliknya, penduduk pribumi atau bangsawan yang belum dapat mengenal huruf Latin, masih menggunakan Arab-Melayu.

Sesungguhnya usaha untuk memperkenalkan bahasa Barat (Latin) pada awalnya berkaitan dengan politik bahasa yang dimaksudkan, agar aparat pemerintah kolonial tidak mengalami kesulitan dalam



berkomunikasi dengan penduduk pribumi. Dalam hubungan itulah, maka pada tahun 1818 ditetapkan bahwa salah satu tugas pemerintah Hindia Belanda adalah “Merencanakan langkah yang tepat untuk menyebarluaskan pengetahuan bahasa Melayu, Jawa, dan bahasa-bahasa lainnya di antara penduduk bangsa Eropa.”²¹ Dua tahun selepas pemerintahan peralihan Inggris (1811—1816), usaha penyebarluasan huruf Latin dalam bahasa Melayu, diimplementasikan di dalam hampir semua peraturan yang dikeluarkan pemerintah. Tujuan lain dari usaha itu adalah sebagai langkah yang mendorong pemutusan bahasa Melayu dari asosiasi pengaruh Islam yang terikat oleh pemakaian huruf Arab.²² Selepas itu, sejumlah peraturan pemerintah menetapkan betapa penting penguasaan bahasa Melayu bagi aparat pemerintah. Hal itu merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi, jika mereka hendak menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

Gubernur Jenderal Van der Capellen (1816—1826) misalnya, membuat sejumlah peraturan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan bahasa ambtenar Eropa. Di Sekolah Marine, di Semarang (1818), mulai diajarkan bahasa Jawa dan Melayu, di samping bahasa Belanda, Perancis, dan Inggris. Keputusan Gubernemen, 25 Maret 1819, secara tegas mewajibkan para ambtenar agar mereka dalam waktu setahun harus mampu menyelesaikan pekerjaan mereka tanpa bantuan seorang penerjemah. Bagi asisten-residen, sekretaris dan para pengawas di pemerintahan dalam negeri, dalam waktu dua tahun harus dapat membaca dan mengerti bahasa daerah (termasuk bahasa Melayu).

Kebijakan pemerintah mengenai pentingnya penguasaan bahasa Melayu ini kemudian dilanjutkan lagi oleh Gubernur Jenderal H.M. de Kock²³ (1826—1830) yang mengeluarkan peraturan No. 16, 14 April 1826 bahwa semua ambtenar sipil dan militer yang bertugas di pos-pos sipil wajib mempelajari buku tata bahasa Melayu dan kamus Melayu karya W. Marsden.²⁴ Dalam keputusan pemerintah No. 38, 22 November 1827 dinyatakan bahwa kenaikan pangkat di dalam dinas tergantung kepada taraf pengetahuan bahasa Melayu dan Jawa. Kedudukan bahasa Melayu menjadi semakin penting sebagai bahasa administrasi dan birokrasi pemerintahan selepas Gubernur Jenderal D.J. de Eerens (1836—1840) mengeluarkan Keputusan No. 30, 22 Mei 1837. Dalam keputusan itu, dinyatakan bahwa semua permohonan, usul penempatan, atau kenaikan pangkat di lingkungan Pemerintahan Dalam Negeri harus disertai dengan ijazah yang menyatakan penguasaan bahasa Melayu dan bahasa-bahasa di Pulau Jawa (Jawa, Sunda, dan Madura). Tujuannya adalah untuk dapat mengungkapkan sesuatu dalam bahasa itu dan mampu membaca dan menulis huruf-hurufnya agar bisa berkorespondensi tentang urusan kedinasan dengan priyayi-priyayi pribumi.²⁵

Diterbitkannya sejumlah keputusan atau peraturan pemerintah yang menempatkan penguasaan bahasa Melayu sebagai salah satu syarat penting bagi pegawai pemerintah berdampak sangat luas. Bagi bahasa Melayu itu sendiri, makin mengukuhkan peranannya sebagai bahasa perhubungan, baik sebagai alat berkomunikasi antarpenduduk pribumi yang berlatarbelakang etnis non-Melayu, maupun dengan orang asing (Eropa—Belanda). Ia juga makin memperlihatkan prestisenya sebagai bahasa ilmu pengetahuan²⁶ yang mulai ramai dipelajari dan diteliti orang-orang Eropa dalam berbagai penelitian ilmiah. Bagi pihak pemerintah kolonial Belanda, peraturan itu memaksa para birokrat Belanda



mempelajari bahasa Melayu yang pada gilirannya memudahkan mereka dalam menjalankan tugas-tugas birokrasi pemerintahannya. Di pihak lain, pemerintah juga harus menyediakan guru dan institusi pendidikan. Itulah salah satu alasan perlunya didirikan Akademi Delft.²⁷ Dalam laporan Menteri Koloni J.C. Baud (1840—1849) kepada Raja, 28 Juni 1842 mengenai keberadaan Akademi Delft sebagai lembaga yang diharapkan dapat mencetak tenaga-tenaga ambtenar Hindia Belanda yang mempunyai pengetahuan bahasa secara baik. Ia juga mengungkapkan alasan belum perlunya bahasa Belanda diajarkan bagi penduduk pribumi. Dalam hal tersebut, ia mengingatkan kedudukan pemerintah Belanda dalam melangsungkan kekuasaannya di Hindia sebagai wilayah koloninya. *Jika suatu bangsa yang dijajah selalu diajak bicara dalam bahasa asing, mereka akan senantiasa diingatkan ... akan kedudukannya sebagai bawahan (Historische Nota, 1900: 23).*²⁸

Di Hindia Belanda sendiri beberapa sekolah gubernemen bagi anak-anak pribumi baru didirikan pada tahun 1849 dengan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar, dan bahasa Melayu sebagai salah satu mata pelajaran. Sementara itu, bahasa Belanda belum diajarkan karena dianggap belum saatnya diberikan kepada anak-anak pribumi. Jika bahasa Belanda diajarkan, ia hanya akan menambah beban pendidikan saja, begitulah gagasan yang dilontarkan Baud.²⁹ Boleh jadi lantaran itu pula, maka Gubernur Jenderal J.J. Rochussen mengusulkan agar bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pemerintahan dalam pergaulan dengan kepala-kepala pribumi. Oleh sebab itu, bahasa Melayu di sekolah-sekolah pribumi harus menjadi pelajaran penting, sementara bahasa-bahasa pribumi hanya sekadar tambahan saja. Selanjutnya, van Rochussen mengatakan:

Bahasa Melayu adalah *lingua franca* di seluruh kepulauan Nusantara, dipakai dalam pergaulan oleh semua orang dari berbagai bangsa. Kebanyakan orang pribumi, terutama orang Jawa, tidak merasa sulit mempelajari bahasa itu dan hampir semua priyayi di Jawa mengerti dan juga menulisnya.³⁰

Bahasa Melayu Pasar dan Bahasa Melayu Sekolah

Berdasarkan keputusan Gubernemen, No. 5, 13 Maret 1849, No. 5, dinyatakan perlunya mendirikan sekolah-sekolah pribumi, terutama bagi ambtenar (priyayi) pribumi dengan bahasa pribumi sebagai bahasa pengantarnya. Sementara itu, bahasa Melayu menjadi mata pelajaran yang ditulis dengan huruf Arab dan Latin. Pada tahun 1850, Rochussen menetapkan pemakaian bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah gubernemen bagi anak-anak pribumi.

Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar dan ditempatkan sebagai mata pelajaran penting di sekolah-sekolah. Hal itu tidak hanya mengukuhkan keberadaan bahasa Melayu dalam dunia pendidikan pribumi, tetapi juga membawa bahasa Melayu sebagai bahasa pergaulan sehari-hari di kalangan elite (priyayi) pribumi dan bangsa Eropa, terutama Belanda. Mengenai dampak ditetapkannya bahasa Melayu di sekolah-sekolah gubernemen, Groeneboer mengatakan:

Sebagai akibat dari kurikulum untuk kedinasan di Hindia-Belanda, bahasa Melayu mencapai kemajuan yang pesat... di luar Jawa dan Madura, bahasa Melayu dipergunakan secara umum sebagai bahasa pemerintahan di dalam kedinasan, di dalam komunikasi dan korespondensi antara amtenar Eropa dan priyayi-priyayi di daerah, antara orang Eropa dan penduduk pribumi, tetapi juga antara orang Eropa dan amtenar



pribumi dan antara kelompok orang Timur-Asing yang berdagang di mana-mana ... bagian terbesarnya terdiri orang-orang Cina yang lahir di Hindia-Belanda, disebut 'peranakan' dan bahasa mereka adalah bahasa Melayu.³¹

Demikianlah, tidak dapat dihindarkan terjadinya perkembangan bahasa Melayu dalam dua jalur: (1) bahasa Melayu lisan yang digunakan dalam pergaulan sehari-hari di kalangan priyayi, dan masyarakat luas, termasuk Cina peranakan yang bagi golongan masyarakat ini lazim disebut bahasa Melayu pasar, dan (2) bahasa Melayu yang dipakai dalam dunia persekolahan yang secara taat asas memakai model bahasa Melayu tinggi.³²

Bersamaan dengan itu, pengenalan dengan alat cetak membuka kemungkinan lain bagi perkembangan bahasa Melayu. Dalam hal ini, tidak dapat diabaikan peran pengelola dan pengusaha percetakan. Terbitnya buku-buku cetak dan lahirnya sejumlah surat kabar berbahasa Melayu memperlihatkan perkembangan bahasa Melayu dalam dua jalur itu, yaitu bahasa Melayu tinggi dan bahasa Melayu pasar. Surat kabar berbahasa Melayu pertama, *Soerat Kabar Bahasa Melajioe*, terbit di Surabaya, 12 Januari 1856, memakai bahasa Melayu pasar mengingat sebagian besar isinya berupa iklan-iklan perdagangan yang sasaran pembacanya adalah para pedagang. Perhatikan sebagian keterangan yang menunjukkan isi dan sasaran pembaca surat kabar ini:

Bermoelanja kita mengloearkan kepada orang2 njang soeka batja ini Soerat Kabar, njang bergoena soeda terseboet di dalam Soerat Kabar Oostpost, jaini Soerat Kabar bahasa Melajioe sanget didjadikan pertolongannja orang berdagang di negrie Djawa soblah timoer. Mangka segala orang berdagang njang soeka taroh satoe kabar dari dagang atawa beladjar, berseangkat, datang dari pendjoewalan barang, harga oetawa dari lain2 kabar, ija boleh kirim di kantor tjitakan ini soerat di kota Soerabaija.³³

Perhatikan kutipan di bawah ini yang diambil dari halaman depan surat kabar itu yang memperlihatkan banyaknya salah cetak dan ejaan yang tidak konsisten.

Harganja ini Soerat Kabar Bahasa Melajioe dalem satoe taoen poenja moesti di bajar lebih dahoeloe, pada njang kloewarken ini soerat. Harganja kabaran njang 10 perkataan f. 1.- rec selainja zegel. Dan boleh dapet darie E. Fuhri di Soerabaija.³⁴

Pilihan pemakaian bahasa Melayu bagi surat kabar, jelas berkaitan dengan tujuan untuk menjangkau sasaran pembaca yang lebih luas.³⁵ Bahasa Melayu pasar yang digunakannya tidak pula berarti ada penafikan terhadap bahasa Melayu tinggi. Masalah pemakaian bahasa Melayu tinggi atau Melayu rendah ini disadari pula oleh pengelola *Soerat Chabar Betawie* yang terbit setiap hari Sabtu di Betawi, April 1858. Berikut ini dikutip pernyataan mengenai hal tersebut yang terdapat dalam edisi pertama surat kabar itu:

Inie soerat chabar nantie di tjitaq separo dengan hoeroef Walanda, separo dengan hoeroef Malajioe. Maka bahasanja inie soerat chabar tiada terlaloe tinggi, tetapi tiada lagi terlaloe rindah, soepaija segala orang boleh mengarti, siapa djoega jang mengarti bahasa Malajioe adanja. Maka barang kali kita masoq-kan soerat pengadjaran maka di sitoe nantie membahasa Malajioe tinggi, tetapi kita harap nantie menjatakan artienja di dalam bahasa Melajioe rindah ...³⁶



Perkembangan bahasa Melayu lewat surat-surat kabar yang kebanyakan memakai bahasa Melayu rendah itu tak hanya makin meluaskan tradisi penulisan bahasa Melayu, baik dengan huruf Arab-Melayu maupun huruf Latin. Akan tetapi, hal itu menumbuhkan kesadaran pentingnya keseragaman penulisan huruf dan ejaan bahasa Melayu yang standard.³⁷ Dalam kaitan itu, pada tahun 1891, A.A. Fokker menganjurkan pemakaian bahasa Melayu—Riau yang dikatakannya:

“... bukan saja sebagai alat peradaban, tetapi juga sebagai bahasa pemersatu pemerintahan di seluruh kepulauan ini.... Akan datang suatu masa, di mana kita dapat memberi sumbangannya, yaitu bahwa setiap orang Pribumi yang telah menamatkan sekolah dasar, akan merasa malu kalau dia tidak mampu berbahasa Melayu—Riau ...”³⁸

Kalangan zending dan para pendeta, di antaranya, A. Huetting dan van der Roest, juga cenderung memilih bahasa Melayu-Riau karena dianggap sebagai bahasa Melayu yang baik.

“... agar lambat laun bahasa Melayu yang baik, yaitu bahasa Melayu-Riau diajarkan di sekolah-sekolah ... sebagai bahasa yang memungkinkan berbagai suku bangsa hidup rukun sebagai saudara dan berunding tanpa cemburu dan iri hati, dan juga dapat menjadi penghubung bagi orang-orang Kristen lainnya di kepulauan ini.”³⁹

Penempatan bahasa Melayu-Riau sebagai mata pelajaran dalam dunia pendidikan telah dilakukan jauh sebelum itu, yaitu ketika bahasa Melayu diajarkan di sekolah-sekolah. Penegasan kembali pemakaian bahasa Melayu Riau itu, semata-mata karena adanya perkembangan bahasa Melayu pasar atau Melayu rendah yang banyak digunakan dalam surat-surat kabar dan dalam pergaulan sehari-hari. Untuk menghindari terjadinya kekacauan, terutama dalam penulisan huruf dan ejaan, maka diperlukan acuan bahasa Melayu yang baik dan standard yang justru masih terpelihara dalam bahasa Melayu Riau. Penulisan kata *Melajoe*, misalnya, kadang kala ditulis *Melaijoe*, *Malajoe* atau *Malaijoe*. Keadaan itu tentu saja dapat menimbulkan kesalahpahaman yang tidak perlu. Oleh karena itu, sebagai usaha untuk memudahkan pembacaan dan penulisan bahasa Melayu serta agar tidak terjadi kesalahpahaman, maka pada tahun 1897, A.A. Fokker mengusulkan penyeragaman bahasa Melayu dengan huruf Latin. Dengan demikian, penyeragaman ini hanya berlaku bagi bahasa Melayu yang menggunakan huruf Latin, dan tidak bahasa Melayu yang menggunakan huruf Arab-Melayu.

Posisi Bahasa Melayu

Memasuki abad XX, kedudukan bahasa Melayu di semua lapisan masyarakat dan di berbagai bidang kehidupan di Hindia Belanda sungguh sudah sedemikian kokohnya. Hal itu tampak pada tahun 1896, Charles Adrian van Ophuijsen,⁴⁰ dibantu Moehammad Ta'ib Soetan Ibrahim—guru di Kawedanan Oud Agam, asal Kota Gadang—dan Engkoe Nawawi Gelar Soetan Ma'moer—guru bantu di Sekolah Rajo—menyusun ejaan bahasa Melayu yang standard yang bersumber dari bahasa Melayu klasik, yang masih terpelihara.⁴¹ Berkat usaha ketiga orang itulah, tersusun *Kitab Logat Melajoe; Woordenlijst voor de spelling der Maleische taal* (Batavia, 1901).⁴² Direktur Pendidikan Abendanon, tahun 1902 mewajibkan semua sekolah di Hindia Belanda untuk menggunakan buku ini



sebagai pedoman ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin. Selain mewajibkan semua sekolah, Pemerintah Belanda juga mengimbuai penerbit-penerbit swasta, terutama surat-surat kabar, agar memakai ejaan ini. Beberapa ada yang mengikuti imbuai itu dan memakai ejaan van Ophuijsen, tetapi lebih banyak yang tetap memakai bahasa Melayu pasar.

Dengan diberlakukannya ejaan van Ophuijsen di semua sekolah, maka dalam dunia pendidikan itulah bahasa Melayu tinggi menempati kedudukannya yang tetap terpelihara. Keadaan itu didukung pula oleh buku-buku bacaan sekolah yang diterbitkan *Commissie voor de Inlandsche School en Volkslectuur* (Komisi untuk Bacaan Sekolah Pribumi dan Bacaan Rakyat) yang berdiri 14 September 1908 dan tahun 1917, yang berganti nama menjadi *Kantoor voor de Volkslectuur* (Balai Pustaka). Komisi ini berusaha secara ketat menerbitkan buku-buku bacaan yang isinya tidak hanya harus sejalan dengan politik kolonial Belanda,⁴³ tetapi juga bahasanya harus taat berpedoman pada ejaan Ophuijsen. Seperti dikatakan Nur Sutan Iskandar, "... Gubernemen Hindia Belanda menghendaki supaya buku-buku batjaan yang akan dikeluarkan Balai Pustaka harus mempergunakan bahasa Melaju Riau, bahasa sekolah, yang telah ditetapkan dalam tahun 1901 itu."⁴⁴

Sementara itu, terjadinya perubahan politik di negeri Belanda berpengaruh pula terhadap kebijaksanaan Belanda di tanah jajahan.⁴⁵ Di balik misi memberi kesejahteraan bagi penduduk pribumi di Hindia Belanda, tersimpan politik kebudayaan (politik bahasa) untuk "membelandakan" pola pikir dan perilaku bangsa terjajah.⁴⁶ Oleh karena itu, mulailah politik itu dijalankan dengan kembali menekankan pemberian mata pelajaran bahasa Belanda di semua tingkat persekolahan. Bahasa Belanda yang semula diajarkan di sekolah-sekolah gubernemen, kini dicobakan pula di sekolah pribumi di tingkat yang lebih rendah.

Dalam kaitannya dengan usaha "pembelandaan" itu, Belanda melakukan apa yang disebut pendekatan asimilasi atau adaptasi. "Kekuasaan kolonial harus berusaha sekeras mungkin untuk menyamakan penduduk asli, jadi juga harus memberikan perlakuan yang sama seperti yang ada di negara induk. Peradaban "barat" harus menerobos masuk ke penduduk yang bukan Eropa."⁴⁷

Dalam pelaksanaannya, pendekatan asimilasi atau adaptasi dilakukan pemerintah Belanda di Indonesia secara setengah-setengah. Bahasa pengantar dalam pengajaran memang menggunakan bahasa Belanda, tetapi tidak dalam rangka mempersamakan dan memperlakukan penduduk asli seperti yang ada di negara induk (Belanda), malahan tetap dalam usaha memberi keuntungan yang maksimal bagi negara induk.

... sekolah-sekolah sekuler yang dikembangkan pemerintah (kolonial: MSM) bukanlah hasil pertumbuhan lokal, melainkan hasil manipulasi kebudayaan model Barat yang berakar pada negeri asal penjajah, baik organisasinya, maupun kurikulumnya.⁴⁸

Hal yang menonjol dari pendekatan asimilasi atau adaptasi di bidang pengajaran itu adalah usaha menyelusupkan peradaban Barat (baca: pembelandaan). Usaha pembaratan makin gencar dilakukan melalui pengajaran bahasa Belanda. Dr. G.J. Nieuwenhuis, pakar di bidang pengajaran bahasa ini menyatakan keyakinannya, bahwa:



...penyebaran bahasa Belanda dan budaya Belanda merupakan cara yang terbaik untuk mengekalkan kepentingan ekonomi ideal kami (Belanda: MSM).⁴⁹

...penyebaran bahasa Belanda di Indonesia ini bukan saja goenanja oentoeik mempertahankan kepentingan negeri Belanda didaerah ini, hal itoe perloe djoega oentoeik mengangkat deradjat dan nama Negeri Belanda dinegeri asing...⁵⁰

Kalau lambat laen semilioen bangsa Hindia jang terpeladjar pandai berbitjara dan mengerti bahasa kita ... maka boekoe Belanda, pekerdja Belanda, pikiran Belanda akan tetap mendjalankan pengaroehnja, dan barang-barang Belanda akan tetap lakoe selama waktu djadjahan ...⁵¹

Kalau kita ingin memajukan persatuan Hindia-Belanda, kita harus mulai dari lapisan atas; yaitu para pemimpin, dan kita harus menjadikan satu bahasa sebagai bahasa pengikat yang mewakili kebudayaan internasional, dan itu adalah bahasa Belanda.⁵²

Jika saja sejak awalnya pemerintah Belanda tidak melakukan diskriminasi dan mengajarkan bahasa Belanda tidak semata-mata sekadar menciptakan tenaga menengah yang dapat menghubungkan dan menerjemahkan kebijaksanaan pemerintah kepada penduduk pribumi, maka mungkin saja, bagi kalangan tertentu, impian Nieuwenhuis itu dapat menjadi kenyataan. Sesungguhnya, gagasan ideal Nieuwenhuis itu lebih mudah dijalankan di atas kertas daripada diimplementasikan dalam kehidupan sosio-kultural. Sebaliknya, usaha pengajaran bahasa Belanda (pembelandaan) dirasakan makin menjauhkan kaum terpelajar bangsa Indonesia dengan rakyatnya.

Berkaitan dengan hal itu, timbul pula kesadaran akan pentingnya mempunyai bahasa sendiri. Dalam kongres kedua Boedi Oetomo (BO), tahun 1909, misalnya, dipilih bahasa Melayu sebagai bahasa bersama dalam rapat-rapat Boedi Oetomo. Malah Ketua BO, Tirtokoesoemo mengusulkan pemakaian bahasa Melayu, supaya “semua orang Jawa bisa mengerti.” Usul itu didukung pula oleh Kartaatmadja, salah seorang anggota BO, agar seluruh pembicaraan dalam kongres menggunakan bahasa Melayu.⁵³

Surya Ningrat,⁵⁴ tokoh nasionalis yang kemudian menjadi anggota Volksraad (Dewan Perwakilan Rakyat), dalam pidatonya (preadvis) pada Kongres Pendidikan Kolonial tahun 1916, sudah menganjurkan agar bahasa Melayu—yang sudah resmi sebagai bahasa pengantar di semua tingkatan sekolah pribumi—dikembangkan lebih jauh menjadi bahasa persatuan di kepulauan Nusantara. Hanya bahasa Melayu, satu-satunya bahasa pribumi yang berpeluang dapat diterima sebagai bahasa komunikasi antaretnis. Menurut pengakuan Soekarno, sudah sejak muda ia mendukung pentingnya bahasa Melayu. Dalam pertemuan dengan kelompok belajar Tri Koro Darmo di Surabaya, tahun 1917, ia mengatakan:

“Saya berpendapat bahwa kita pertama-tama harus mempelajari bahasa kita sendiri.... Marilah kita berkonsentrasi pada kelanjutan hidup bahasa Melayu dan andaikata kita harus mempelajari salah satu bahasa asing, biarlah itu bahasa Inggris, karena sekarang pun bahasa itu telah menjadi bahasa diplomatik.”⁵⁵

Bahasa Melayu menjadi Bahasa Indonesia

Pada sidang pertama saat Volksraad dibentuk, tahun 1918, Pangeran Achmad Djajadiningrat mengusulkan agar dalam Peraturan Tata Tertib Volksraad dicantumkan bahasa Melayu sebagai bahasa



pengantar resmi yang digunakan dalam sidang-sidang Volksraad, di samping bahasa Belanda.⁵⁶ Kemudian, dalam Kongres Pemuda Pertama (*Eerste Indonesisch Jeugdcongres*) 1926, Muhammad Yamin yang berpidato dalam bahasa Belanda menyampaikan gagasannya tentang bahasa Melayu sebagai berikut:

Bagi saja sendiri, saja mempoenjai kejakinan, bahwa bahasa Melajoe lambat laoen akan tertoendjoe mendjadi bahasa pergaoelan oemoem ataupoen bahasa persatoean bagi bangsa Indonesia, dan bahwa keboedajaan Indonesia dimasa jang akan datang akan terdjelma dalam bahasa itoe.⁵⁷

Kongres pemuda pertama itu belum menghasilkan keputusan politik yang penting, embrio tentang tanah air, bangsa, dan bahasa persatuan sudah mulai wujud. Oleh karenanya, dalam Kongres Pemuda kedua, di Jakarta, 28 Oktober 1928, diputuskanlah pernyataan politik sebagaimana yang tertuang tiga butir Sumpah Pemuda.⁵⁸ Butir ketiga yang berbunyi: “Kami poetra dan poetri Indonesia mendjoendjoeng bahasa persatoean, Bahasa Indonesia” merupakan keputusan politik yang menempatkan bahasa Melayu tidak lagi berada di dalam konteks etnisitas, melainkan dalam kerangka keindonesiaan yang bertanah dan berbangsa (Indonesia).

Dengan demikian, melalui proses yang sangat panjang kelahiran bahasa Indonesia seperti sudah ditakdirkan harus begitu. Kelahirannya tidaklah datang secara tiba-tiba sebagai sesuatu yang datang dari langit. Oleh karena itu, ia tidak dapat melepaskan diri dari masa lalu yang melatarbelakanginya. Bahasa Indonesia lahir karena ia mempunyai sejarah panjang masa lalu “sesuatu yang *logish gevolg* (akibat logis) dan *logische voortzetting* (perkembangan logis) dari masa yang silam.”⁵⁹

Sebagai keputusan politik, niscaya pengangkatan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia berimplikasi politik. Bagi bangsa Indonesia yang mulai menjalankan kesadaran kebangsaannya, keputusan itu membawa pengaruh positif. Sejak keputusan “menjunjung bahasa persatuan: bahasa Indonesia” hampir semua organisasi pergerakan nasional menyatakan akan menggunakan bahasa Indonesia di dalam persidangan-persidangannya. Dengan demikian, bahasa Indonesia menjadi semacam alat politik untuk membangun persatuan keindonesiaan. Itulah sebabnya, tidak sedikit tokoh nasionalis Indonesia merasa sudah sangat terbiasa berpikir dalam bahasa Belanda daripada dalam bahasa Indonesia, di dalam forum-forum resmi mereka tetap memakai bahasa Indonesia.

Sebagai alat politik untuk menumbuhkan kesadaran keindonesiaan, anjuran pemakaian bahasa Indonesia dalam semua organisasi pergerakan seolah-olah sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan organisasi itu. Soekarno, misalnya, dalam “Rantjangan reorganisatie Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Bangsa Indonesia (PPPKI) menekankan kembali pentingnya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, “... dengan gerakan kebangsaan baroe itoe tersangkoet djuga soal bahasa jang djadi pengikat bangsa-bangsa segolongan itoe. Maka timboellah bahasa persatoean: bahasa Indonesia jang pokoknja diambil dari bahasa Melajoe.”⁶⁰

Bahasa Indonesia dalam Sekolah



Dalam dunia persekolahan dan sistem pendidikan, kedudukan bahasa Indonesia masih tetap berada di bawah bayang-bayang bahasa Belanda. Meski begitu, di Sekolah Taman Siswa dan Perguruan Rakyat, pelajaran bahasa Belanda mulai dikurangi karena dianggap sekadar menambah beban saja. Dalam kaitan itulah, pelajaran bahasa Melayu di kedua sekolah itu serta jumlah jam pengajarannya ditambah. Salah satu kekurangan yang menonjol dari pengajaran bahasa Indonesia di sekolah waktu itu adalah minimnya buku-buku pelajaran bahasa Indonesia yang memadai, bukan pelajaran tatabahasa yang disusun orang-orang Belanda.⁶¹ Mengingat pelajaran bahasa Indonesia di sekolah-sekolah sebagian besar menggunakan buku-buku tatabahasa karya para penulis Belanda, maka materi yang diajarkan cenderung menjadi sangat linguistik.⁶² Akibatnya, pelajaran bahasa Indonesia di sekolah-sekolah sama sekali tidak mengarahkan penguasaan keterampilan berbahasa, melainkan membawa siswa seolah-olah hendak menjadi seorang linguist atau ahli bahasa. Kondisi itulah yang dikeluhkan Sutan Takdir Alisjahbana, “Pada sekolah menengah Goebememen sekarangpoen masih haroes kita berkata, bahwa pengadjaran bahasa Indonesia itoe tidak berarti sedikit djoeapoen.”⁶³

Di bagian lain, Alisjahbana mengatakan:

Pengadjaranja jang menghamba kepada gramatika bahasa jang dipakai, ketika nenek mojang kita masih berdjalan kaki dan naik bidoek jang rapoeh itoe, mematkan segala minat kepada bahasa. Tjara mengadjarakan jang tiada bersemangat, jang semata-mata mengisi kepala dengan tiada memperdoelikan semangat kanak-kanak, dalam segala hal mematkan kegembiraan kepada bahasa.

Boekoe batjaan, boekoe ilmoe bahasa!

Bahasa jang sepatoetnja diadjarakan di sekolah oentoek dipakai dalam penghidoepan mendjadi sesoeatoe jang sengadja diadjarakan semata-mata untuk sekolah itoelah.⁶⁴

Dalam hal ini, boleh dikatakan bahasa Melayu yang kemudian diangkat menjadi bahasa Indonesia memperoleh kemenangan dalam persaingannya dengan bahasa Belanda. Perkembangan bahasa Indonesia sendiri belum memperlihatkan kemajuan yang berarti. Perkembangan bahasa Indonesia dalam sistem pendidikan dan persekolahan—sebagaimana yang menjadi keprihatinan Alisjahbana—justru cenderung menjauhkan tujuan pengajaran bahasa untuk keterampilan berbahasa. Dalam dunia pers,⁶⁵ pemakaian bahasa Melayu rendah—meski sudah dikatakan sebagai bahasa Indonesia—masih sangat menonjol. Demikian juga buku-buku dari penerbit swasta, terutama roman-roman picisan, hampir semuanya menggunakan bahasa Melayu rendah.

Besarnya perhatian terhadap bahasa Indonesia, baik dalam kaitannya dengan rasa nasionalisme, maupun dengan harapan-harapan yang begitu besar terhadap kemajuan bahasa Indonesia sendiri, tampak dengan munculnya gagasan untuk menyelenggarakan Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo, 25-28 Juni 1938. Salah satu tujuan kongres ini adalah mencari pegangan bagi semua pemakai bahasa, mengatur bahasa, dan mengusahakan agar bahasa Indonesia tersebar luas.⁶⁶ Dalam kaitan bahasa Indonesia dengan dunia persekolahan dan sistem pendidikan, kongres merekomendasikan agar: (1) di dalam perguruan menengah diajarkan juga ejaan internasional, dan (2) mengangkat sebuah komisi yang bertugas mendirikan Institut Bahasa Indonesia.⁶⁷



Bahasa Indonesia Setelah Kedatangan Jepang

Keadaan pengajaran bahasa Indonesia—yang oleh pihak Belanda masih disebut bahasa Melayu—di sekolah-sekolah masih terus seperti itu. Barulah perubahan drastis terjadi setelah kedatangan Jepang ke Indonesia, awal Maret 1942. Jepang mengganti kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Berbagai langkah kebijaksanaan pemerintahan pendudukan Jepang yang segera dijalankan adalah menghapus semua jejak pemerintah Belanda. Di dalamnya, termasuk juga persoalan bahasa.

Instruksi dari Panglima Perang Bala Tentara Dai Nippon yang dimuat bersamaan dengan edisi pertama surat kabar *Asia Raja*, (29 April 1942/2602) misalnya, jelas merupakan pengumuman pemerintah Jepang mengenai kebijaksanaan yang akan dijalankan di wilayah Indonesia. Butir keenam dari sepuluh butir maklumat itu berbunyi sebagai berikut: “*Nama-nama negeri dan kota diseloeroeh poelaoe Djawa jang mengingatkan kepada zaman pemerintah Belanda almarhum ditoe kar dengan nama-nama menoeroet kehendak ra’jat.*” Pengumuman sejenis, baik yang menyangkut pemberlakuan kebijaksanaan politik pemerintah pendudukan Jepang, instruksi-instruksi, peraturan-peraturan, maupun rencana perayaan hari-hari tertentu yang dianggap dapat memberi semangat bagi perjuangan bangsa-bangsa Asia (baca: Jepang). Hal ini kerap kali mengisi lembaran-lembaran halaman surat kabar *Asia Raja*.⁶⁸

Bagi pemerintah pendudukan Jepang, dalam soal bahasa yang akan digunakan dalam urusan kedinasan, memang tidak ada pilihan lain, selain memilih bahasa Indonesia. Pemerintah Jepang sendiri melarang digunakannya bahasa Belanda, Inggris, atau bahasa negara-negara yang pro-Sekutu. Sementara itu, bahasa Jepang sendiri sama sekali belum dikenal masyarakat Indonesia. Wajar jika kemudian pemerintah Jepang menentukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi yang digunakan dalam berbagai urusan, baik kedinasan, maupun urusan lain di luar itu. Langkah pertama yang dilakukan Pemerintah Jepang adalah menerjemahkan buku-buku yang berbahasa pro-Sekutu ke dalam bahasa Indonesia, termasuk di dalamnya bidang peristilahan.

Sebagai realisasi dari kebijaksanaan itu, tanggal 26 Oktober 1942, dibentuklah Komisi Istilah Bahasa Indonesia. Salah satu tugas utamanya adalah menciptakan istilah-istilah dalam bahasa Indonesia untuk menggantikan istilah-istilah bahasa Belanda dan Inggris. Karya penting yang dihasilkan komisi ini adalah terkumpulnya 7000 istilah baru bahasa Indonesia. Penerbit Kebangsaan Poestaka Rakyat, Jakarta, lalu menerbitkannya sebagai *Kamoes Istilah* dalam dua jilid (I: *Kamoes Istilah: Asing—Indonesia*, terbit 1945, II: *Kamoes Istilah: Indonesia—Asing*, terbit 1947) dengan Kata Pengantar Sutan Takdir Alisjahbana.

Kebijaksanaan Jepang yang menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam pemerintahan dan kehidupan sosial-politik telah menempatkan bahasa Indonesia menjadi begitu penting. Sebulan setelah Jepang menguasai wilayah Indonesia, pemerintah Jepang segera menerbitkan sejumlah surat kabar dan majalah berbahasa Indonesia.⁶⁹ Pada bulan Mei 1942, pemerintah pendudukan Jepang mengeluarkan perintah bahwa semua toko, restoran, sekolah, perusahaan, perhimpunan, dan



sebagainya diharuskan mengganti papan nama, tulisan dan reklame dengan yang berbahasa Jepang atau Indonesia.⁷⁰

Begitu pula, pada tahun 1942 itu, E. St. Harapan, penyusun *Kitab Arti Logat Melajoe*,⁷¹ diminta segera menyusun kembali kamus itu. Terbitlah pada tahun itu *Kamoes Indonesia* yang sebenarnya lebih merupakan edisi revisi *Kitab Arti Logat Melajoe* karena di dalamnya memang ada penambahan beberapa entri. Inilah kamus pertama yang memakai kata *Indonesia* dalam dunia perkamusian Indonesia.⁷² Kamus yang tebalnya 452 halaman itu disusun hanya dalam waktu 70 hari. Waktu yang relatif singkat untuk penyusunan sebuah kamus. Namun, tampak juga di sini bahwa kebutuhan kamus bahasa Indonesia waktu itu begitu mendesak untuk segera menghapus segala pengaruh bahasa Belanda.⁷³

Mengenai bahasa Indonesia di persekolahan, pemerintah Jepang tetap menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, di samping dipelajari juga sebagai mata pelajaran, berdampingan dengan pelajaran bahasa Jepang. Dalam usaha mempercepat penduduk Indonesia mempunyai kemahiran bahasa Jepang, di hampir semua media massa yang terbit waktu itu disediakan pula rubrik-rubrik pelajaran bahasa Jepang dengan terjemahan atau penjelasannya dalam bahasa Indonesia.

Penutup

Demikianlah perjalanan panjang riwayat bahasa Melayu—Indonesia yang dalam konteks sistem pendidikan, sering tidak dapat melepaskan diri dari berbagai kepentingan politik pemerintah yang berkuasa. Begitu pula, setelah kedudukan bahasa Indonesia ini secara yuridis dikukuhkan dalam UUD 1945, sebagaimana termaktub dalam Pasal 36, berbunyi: “Bahasa Negara adalah Bahasa Indonesia” maka implikasinya menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, bahasa nasional, bahasa persatuan, bahasa resmi dalam bidang kedinasan dan semua tingkat pendidikan, dan bahasa pergaulan dalam tata kehidupan masyarakat. Dengan begitu, bahasa Indonesia dengan sendiri telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari urat-nadi bangsa Indonesia.

Meskipun demikian, mengingat bahasa Indonesia berasal dan bersumber dari bahasa Melayu, maka usaha untuk mencoba mempertemukan kembali kesamaan dengan bahasa di kawasan ASEAN, seperti bahasa Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam, bukanlah pekerjaan yang mengada-ada. Bahkan, agar tidak terjadi kesalahpahaman, maka usaha mempertemukan kesamaan itu menjadi suatu keniscayaan. Sebagai penutup makalah ini, baiklah saya kutip pernyataan Nur Sutan Iskandar berikut ini:

Pengalaman . . . menundukkan dan mejakinkan saja, bahwa bahasa kita, bahasa Indonesia jang telah dan selalu diperkaja menurut dasar jang baik dan disempumakan itu akan mentjapai tingkat gilang-gemilang kelak. Lebih-lebih lagi apabila usaha Pemerintah RI dan Pemerintah Persatuan Tanah Melaju (Malaysia, MSM) akan menjamakan bahasa Indonesia dengan bahasa Melaju itu kelak sungguh-sungguh dapatlah diharapkan mendjadi sebuah bahasa jang baik dan berkumandang di Asia Tenggara. . .⁷⁴



Lampiran

Poatoesan Congres Pemoeda Pemoeda Indonesia

Kerapatan pemoeda pemoeda Indonesia jang diadakan oleh perkoempoelan perkoempoelan pemoeda Indonesia jang berdasarkan kebangsaan, dengan namanja: Jong Java, Jong Soematra (Pemoeda Soematra), Pemoeda Indonesia, Sekar Roekoen, Jang Islamieten, Jong Bataksbond, Jong Celebes, Pemoeda Kaoem Betawi dan Perhimpoean Peladjar-Peladjar Indonesia;

memboeka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahoen 1928 di negeri Djakarta;
sesoedahnja mendengar pidato-pidato pemitjaraan jang diadakan kerapatan tadi;
sesoedahnja menimbang segala isi-isi pidato-pidato dan pemitjaraan ini;
kerapatan laloe mengambil kepoatoesan:

Pertama: KAMI POETRA DAN POETRI INDONESIA MENGAKOE BERTOEMPAH DARAH JANG SATOE, TANAH INDONESIA.

Kedoea: KAMI POETRA DAN POETRI INDONESIA MENGAKOE BERBANGSA JANG SATOE, BANGSA INDONESIA.

Ketiga: KAMI POETRA DAN POETRI INDONESIA MENDJOENDJOENG BAHASA PERSATOEAN, BAHASA INDONESIA.

Setelah mendengar poatoesan ini, kerapatan mengeloearkan kejakinan azas jang wadjib dipakai oleh segala perkoempoelan perkoempoelan kebangsaan Indonesia;

mengeloearkan kejakinan persatoean Indonesia diperkoeat dengan memperhatikan dasar persatoeannja:

KEMAOEAN
SEDJERAH
HOEKOEM ADAT
PENDIDIKAN DAN KEPANDOEAN

dan mengeloearkan penghargaan, soepaja poatoesan ini disiarkan dalam segala soerat kabar dan dibatjakan di moeka rapat perkoempoelan perkoempoelan kita.

Endnote



¹ Pelajaran bahasa daerah di sekolah sebagai muatan lokal, dipelajari umumnya sekadar pengenalan serba sedikit untuk tujuan komunikasi dalam pergaulan sehari-hari. Sangat mungkin pula dijadikan sebagai mata pelajaran di sekolah sekadar tuntutan kurikulum. Jadi, bukan untuk kepentingan teoretis.

² Mempelajari bahasa Belanda pada zaman kolonial Belanda selain untuk mengangkat status sosial sebagai priyayi, juga untuk tujuan mengejar karier jika ia (hendak) bekerja dalam birokrasi pemerintahan.

³ Matakuliah bahasa Jawa Kuno, bahasa Kawi atau bahasa Sanskerta di perguruan tinggi pada umumnya bertujuan untuk kepentingan teoretis sebagai ilmu, dan bukan untuk kepentingan praktis. Meskipun untuk tujuan membaca naskah kuno atau prasasti, pengetahuan teoretis mengenai cara membaca atau mentranskripsi dan mentransliterasinya, tetap saja diperlukan.

⁴ Boleh jadi semua bahasa yang menjadi bahasa nasional, dipelajari selain untuk pengembangan bahasa itu sendiri, juga untuk tujuan-tujuan lain yang biasanya berkaitan dengan prestise, martabat, budaya, atau nasionalisme bangsa yang bersangkutan.

⁵ Pengajaran bahasa Belanda, bahasa Melayu, dan bahasa Jepang di Indonesia sebelum perang, di dalamnya terkandung tujuan politik untuk kepentingan pemerintahan kolonial.

⁶ Bandingkanlah dengan mata pelajaran bahasa Indonesia sekarang. Kecuali untuk tujuan politik—menumbuhkan rasa nasionalisme—bahasa Indonesia dipelajari untuk tujuan (i) praktis, termasuk di dalamnya untuk mengejar karier mengingat materi bahasa Indonesia diujikan ketika seseorang hendak memasuki perguruan tinggi atau hendak menjadi pegawai negeri, (ii) teoretis berkaitan dengan pengembangan wawasan dan pengetahuan, (iii) untuk pengembangan bahasa itu sendiri. Jadi, pelajaran bahasa Indonesia sekarang dimaksudkan untuk keempat tujuan tersebut.

⁷ Harimurti Kridalaksana ("Pengantar tentang Pendekatan Historis dalam Kajian Bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia" dalam Harimurti Kridalaksana (Ed.), *Masa Lampau Bahasa Indonesia: Sebuah Bunga Rampai* (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hal. 6-7) mencatat sedikitnya 18 prasasti berbahasa Melayu kuno, mulai prasasti Sojomerto yang ditemukan di Pekalongan, bertarikh awal abad ke-7 sampai prasasti Bukit Gombak (Sumatra Barat) yang bertarikh abad ke-14. Delapan prasasti yang lebih awal justru ditemukan di daerah Jawa Tengah (7 buah) dan satu prasasti ditemukan di Bogor, Jawa Barat. Keterangan Harimurti ini sekaligus merevisi pendapat Sutan Takdir Alisjahbana, ("Sejarah Bahasa Indonesia" dalam Harimurti Kridalaksana (Ed.), *Ibid.*, hal. 97) yang menyebutkan bahwa prasasti Gandasuli di Jawa Tengah yang bertarikh 827 dan 832 Masehi merupakan prasasti Melayu tertua.

⁸ Kees Groeneboer, *Jalan ke Barat: Bahasa Belanda di Hindia Belanda 1600-1950* (Jakarta: Erasmus Taalcentrum, 1995), hal. 20-21.

⁹ *Ibid.* Lihat juga Sutan Takdir Alisjahbana, "Bahasa Indonesia," *Poedjangga Baroe* (No. 5, I, November 1933), hal. 150.

¹⁰ *Ibid.* Alisjahbana menerjemahkannya sebagai berikut: "Dan siapa di Hindia tiada tahu bahasa ini, dia tiada boleh mengikut, seperti pada kita bahasa Perancis."

¹¹ A. Teeuw, "Prestise Bahasa Indonesia," dalam *Kompas*, 5-6 Desember 1990. Dimuat juga dalam A. Teeuw, *Indonesia antara Kelisanan dan Keberaksaraan* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1994), hal. 250-262.

¹² Francois Valentijn menulis buku *Oud en Nieuw Oost Indien* (1713) yang terdiri dari lima jilid tebal. Di dalam jilid ketiganya, ia mendaftarkan sejumlah hikayat dan karya dalam bahasa Melayu yang menurutnya, karya-karya itu sudah diketahui penduduk. Jadi, karya-karya berbahasa Melayu waktu itu juga sudah begitu dikenal masyarakat etnis yang bukan Melayu. Lihat Sri Wulan Rujati Mulyadi, *Kodikologi Melayu di Indonesia* (Depok: FSUI, 1994), hal. 30.

¹³ Kees Groeneboer, *Op. Cit.*, hal. 20-21. Valentijn juga melakukan klasifikasi bahasa Melayu. Ia membedakan antara bahasa Melayu Tinggi dan bahasa Melayu Pasar (bahasa yang digunakan untuk kontak niaga) atau bahasa Melayu Kacukan (*Katsyokan*, bahasa campuran atau bahasa pasar). Ia mengatakan sebagai berikut: "Bahasa itu sekarang (walaupun ada yang tidak setuju) ada dua macam, pertama: yang Tinggi yaitu bahasa Melayu yang dipakai orang-orang besar di istana-istana dan dalam urusan yang berhubungan dengan agama Islam, dan kedua: bahasa Rendah, yaitu bahasa pasar, Melayu pasar yang dipergunakan sehari-hari oleh masyarakat." Berbeda dengan pembagian yang dilakukan Valentijn, Marsden membaginya ke dalam empat bahasa, yaitu (i) bahasa Melayu Dalam, yaitu ragam bahasa Melayu yang dipakai untuk menyapa raja atau keluarganya, (ii) bahasa Bangsawan, yaitu ragam bahasa Melayu yang dipakai para keluarga bangsawan di dalam istana, (iii) bahasa dagang atau bahasa pasar, yaitu ragam bahasa Melayu yang dipakai untuk kontak



niaga, dan (iv) bahasa kacukan, yaitu ragam bahasa Melayu yang digunakan di pasar, pelabuhan atau di tempat-tempat bertemunya berbagai macam (suku) bangsa. Sementara itu, Swellengrebel (1974: 8-9; Groeneboer, *Ibid.*, hal. 23) juga membagi empat macam bahasa Melayu, yaitu (i) bahasa Melayu sebagai bahasa asal yang dipakai masyarakat di Selat Malaka, (ii) bahasa Melayu tulisan yang penyebarannya lebih luas, tetapi masih satu keluarga, (iii) bahasa Melayu setempat dengan berbagai variasinya yang dipakai di berbagai daerah yang menggunakan bahasa Melayu sebagai *lingua franca*, dan (iv) bahasa Melayu pasar dengan bentuk yang paling sederhana dan paling banyak unsur serapannya. Groeneboer menggunakan istilah bahasa Melayu Tinggi dalam pengertian bahasa Melayu tulisan yang penyebarannya lebih luas, tetapi masih satu keluarga, untuk menyatakan bahasa Melayu—Sekolah dan bahasa Melayu—Gereja. Sebenarnya masih banyak linguist atau ahli bahasa yang juga melakukan klasifikasi bahasa Melayu. Sumber-sumber itu menunjukkan bahwa perhatian dan minat orang untuk mempelajari dan melakukan berbagai penelitian atas bahasa Melayu sudah sejak lama dilakukan. Sumber-sumber itu juga merupakan bukti, betapa pentingnya kedudukan bahasa Melayu di kepulauan Nusantara ini. Mengenai pengklasifikasian bahasa Melayu, Maman S. Mahayana pernah pula menulis artikel pendek berjudul, "Latar Belakang Lahimya Bahasa Indonesia," *Gaung* (No. 3/II, November 1984), hal. 30-34.

¹⁴ Groeneboer, *Ibid.*, hal. 23.

¹⁵ Sutan Takdir Alisjahbana, "Bahasa Indonesia," *Poedjangga Baroe*, No. 5, I, November 1933, hal. 135. Dengan perbaikan dan penambahan di sana-sini serta perubahan judul menjadi "Sejarah Bahasa Indonesia" artikel ini kemudian dimuat juga dalam Harimurti Kridalaksana (Ed.), *Masa Lampau Bahasa Indonesia: Sebuah Bunga Rampai* (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hal. 95-109.

¹⁶ Kata *Jawi* berasal dari bahasa Arab. Amat Juhari Moain ("Sejarah Tulisan Jawi," *Jurnal Dewan Bahasa*, November 1991, 1001) menyatakan, bahwa kata *Jawi* merupakan bentuk adjektiva dari kata Arab, *jawah* yang menunjuk pada sebuah daerah di Asia Tenggara. Kata *Jawah* dan *Jawi* tidak hanya merujuk pada Pulau Jawa dan orang Jawa, melainkan juga pada seluruh daerah di Asia Tenggara berikut penduduknya sekaligus.

¹⁷ Aksara Arab yang digunakan untuk menulis bahasa Jawa. Tulisan Arab yang tidak memakai tanda-tanda bunyi (diakritik) atau disebut juga tulisan Arab gundul dinamakan juga sebagai huruf Pegon.

¹⁸ Bahasa Melayu yang menggunakan huruf Arab.

¹⁹ Sebelum Islam masuk ke wilayah Nusantara, masyarakat etnis di beberapa daerah sudah mengenal dan menggunakan tulisan (huruf) daerahnya sendiri. Sri Wulan Rujjati Mulyadi (*Kodikologi Melayu di Indonesia*, Depok: FSUI, 1994), misalnya, mencatat lebih dari 20-an huruf-huruf yang digunakan dalam penulisan berbagai naskah daerah. Setelah Islam masuk, huruf Arab diterima, tetapi huruf-huruf daerah, juga masih tetap dipertahankan. Huruf Jawa, Sunda, dan Cirebon, misalnya, sampai sekarang masih banyak digunakan masyarakat setempat, meskipun huruf Arab dan Latin, juga mereka pakai untuk berbagai keperluan tertentu. Di Malaysia penerimaan huruf Latin (Rumi) secara luas baru terjadi selepas Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu ketiga, 16-21 September 1956, sebagaimana yang diusulkan Sastrawan Asas 50. Yang menarik dari usulan sastrawan Asas 50 ini, terutama

Asraf dan Usman Awang Asraf dan Usman Awang adalah keinginannya untuk menyatukan ejaan bahasa Melayu di Malaysia dan Melayu di Indonesia. Berikut ini dikutip salah satu usulannya: "Apabila bahasa Melayu di Malaya dan bahasa Melayu di Indonesia dapat disamakan atau disatukan, maka tukar-menukar pikiran melalui buku, majalah, surat kabar dan lain-lain yang bertulisan Rumi dapat berjalan dengan lebih pesat daripada hal sekarang ini. Dengan adanya hubungan pikiran antara kedua-dua daerah yang menggunakan bahasa Melayu itu maka pertalian darah serta kebudayaan antara bangsa kita di Malaya dan bangsa-bangsa Melayu lainnya di Indonesia (bangsa Indonesia) akan tetap terpelihara dan terus erat sebagaimana yang menjadi cita-cita kita bersama selama ini." (Asraf dan Usman Awang, "Memorandum mengenai Tulisan Rumi untuk Bahasa Melayu." Usulan selengkapnya termuat dalam *Memoranda Angkatan Sasterawan '50* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1962; Edisi kedua diterbitkan Fajar Bakti, 1987), hal. 14-15. Sebelum itu, Za'ba yang menyusun buku *Kitab Rahsia Ejaan Jawi*, 10 November 1928 (terbit jilid pertama, tahun 1929 dan jilid kedua, tahun 1931), telah mengingatkan bahwa dalam masa 20-30 tahun mendatang, tulisan Jawi akan tersisih oleh tulisan Rumi jika buku-buku banyak ditulis dalam tulisan Rumi. Lihat Md. Sidin Ahmad Ishak, *Penerbit & Percetakan Buku Melayu 1807-1960* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1998), hal. 313.

²⁰ Denys Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya: Batas-Batas Pembaratan* (Jakarta: Gramedia, 1996), hal. 96.



²¹Groeneboer, *Op. Cit.*, hal. 104.

²²*Ibid.*, hal. 106.

²³ Hendrik Merkus Baron de Kock (1779-1845) di bidang bahasa sebenarnya tidak terlalu punya peranan penting. Jasanya bagi bangsa Belanda karena reputasi di bidang militer yang berhasil menangkap Pangeran Diponegoro yang kemudian mengakhiri perang Jawa (1825-1830).

²⁴ Kedua buku karya William Marsden itu: *A Grammar of the Malayan Language with an Introduction and Praxis* (London: Cox and Baylis, 1812: 1 + 225 hal.) dan *A Dictionary of the Malayan Language, in Two parts, Malayan and English, and English and Malayan* (London: Cox and Baylis, 1812: xvi + 590 hlm). Sebelum itu, Marsden juga menulis buku *The History of Sumatera* (1783) yang berisi adat-istiadat, bahasa-bahasa, dan undang-undang rakyat Sumatera dan peperangan rakyat Aceh melawan bangsa Portugis di Melaka. A. Wahab Hamzah ("Sejarah Percetakan Buku Bahasa Melayu" *Pelita Bahasa*, Mac 1991: 44-45) mengatakan, bahwa pengetahuan Marsden tentang bahasa Melayu diperolehnya dari ayah Munsyi Abdullah, yaitu Sheikh Abdul Kadir yang mula mengajari Marsden bahasa Melayu. Mengenai peranan Marsden ini, Harimurti Kridalaksana (1982: 133-134) menyebutnya sebagai pelopor penyelidikan bahasa dan kebudayaan Melayu-Indonesia.

²⁵ Kees Groeneboer, *Op. Cit.*, hal. 106.

²⁶ Bukti-bukti mengenai bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu pengetahuan, periksa artikel Hj. Wan Mohd. Shaghir Abdullah, "Karya-Karya Klasik Abad 16: Bukti Bahasa Melayu Bahasa Ilmu," (*Jurnal Dewan Bahasa*, Februari 1990), hal. 90-99.

²⁷ Akademi Pendidikan Insinyur Sipil di Delft ini didirikan tahun 1842, di dalamnya diberikan pendidikan (pelajaran) bahasa dengan tujuan agar para amtenar yang akan bekerja di Hindia-Belanda dapat berbahasa pribumi dengan baik. Akademi ini ditutup tahun 1864 karena dilihat dari segi keuangan dan lulusan yang dihasilkannya dianggap lebih banyak menimbulkan masalah. Antara tahun 1842-1857, misalnya, dari 305 murid, 195 murid di antaranya berasal dari Hindia-Belanda, yang lulus hanya 37 orang. Murid yang berasal dari Belanda sendiri, dari 110 orang yang lulus hanya 34 orang.

²⁸ Kees Groeneboer, *Op. Cit.*, hal. 107.

²⁹ *Ibid.*, hal. 104.

³⁰ *Ibid.*, hal. 112.

³¹ *Ibid.*, hal. 109-110.

³² Pemakaian bahasa Melayu tinggi di dunia pendidikan, relatif lebih terpelihara karena didukung oleh penyebaran buku-buku pelajaran bahasa Melayu, buku-buku terjemahan Alkitab berbahasa Melayu yang dilakukan para misionaris (zending), peraturan-peraturan pemerintah dalam bahasa Melayu, dan penerbitan buku-buku bacaan. Sejak berdirinya Komisi Bacaan Rakyat (1908 dan tahun 1917 komisi ini berganti nama menjadi Balai Pustaka) penyebaran bahasa Melayu tinggi atau bahasa Melayu sekolahan ini makin mapan.

³³ *Soerat Kabar Bahasa Melajoe*, hari Saptoe, tanggal 3 Djoemadilawal, taheen Djawa 1784, taheen Arab 1972, 4 Tjap-dji goe taheen let-bouw, njang 5 dari Amhong, oetawa 12 January 1856. Lihat juga Suripan Sadi Hutomo, *Wajah sastra Indonesia di Surabaya 1856—1994* (Surabaya: Pusat Dokumentasi Sastra Suripan Sadi Hutomo, 1995), hal. 19.

³⁴ Suripan Sadi Hutomo, *Ibid.*, hal. 18.

³⁵ Menjelang berakhir abad ke-19, di Betawi saja sudah terbit sekitar 15-an buah surat kabar bahasa Melayu yang dikelola golongan Cina peranakan dan Indo-Belanda. Memasuki abad ke-20, ada sekitar 50-an surat kabar berbahasa Melayu, baik yang menggunakan huruf Latin, maupun Arab-Melayu. Sebagian besar surat kabar itu menggunakan bahasa Melayu pasar. Meskipun demikian, surat kabar pertama yang dikelola pribumi, *Soenda Berita*, terbit pertama kali di Cianjur, Februari 1903, menggunakan bahasa Melayu yang dilihat dari gaya bahasanya tergolong bahasa Melayu sekolahan (Melayu tinggi). Maman S. Mahayana, "Majalah Wanita Awal Abad XX (1908-1928)" Laporan Penelitian (tidak dipublikasikan). (Depok: Lembaga Penelitian Universitas Indonesia, 2000), hal. 12-21.

³⁶ Hutomo, *Op. Cit.*, hal. 19-20. Mahayana, *Ibid.*, hal. 14-16.

³⁷ Pemakaian bahasa Melayu rendah dan bahasa Melayu tinggi untuk surat-surat kabar ini, seringkali atas pertimbangan ekonomis. Dengan pemakaian bahasa Melayu rendah, media itu dapat menjangkau pembaca semua kalangan. Majalah *Poetri Hindia*, sebuah majalah wanita pertama yang dikelola pribumi, terbit pertama kali di Betawi, 1 Juli 1908, menolak pemakaian ejaan van Ophujsen, karena pertimbangan sasaran pembacanya. Dalam sebuah artikel berjudul, "Perloekah



Poetri pake logat Ophuizen” (*Poetri Hindia*, No. 1, II, 15 Januari 1909), dikatakan bahwa majalah itu sebagai “*taman di mana segala bangsa dari anak Hindia boleh datang bergaol satoe dengan jang lain, ta’ perloe mempergoenakan bahasa jang di ertikan oleh berdjenis-djenis bangsa jang bertainan bahasa ...* (maksudnya, bangsa Belanda: MSM). Mengenai bahasa Melayu rendah atau lebih khusus bahasa Melayu Tionghoa, Sutan Takdir Alisjahbana justru melakukan pembelaan terhadapnya. Dalam artikelnya, “Kedoedoekan Bahasa Melajoe-Tionghoa” (*Poedjangga Baroe*, No. 4, Th. II, Oktober 1934; 97-105), STA mengatakan: “Kedoedoekan bahasa Melajoe-Tionghoa sebagai bahasa perhoeboengan disisi bahasa Indonesia itoe haroes kita anggap sebagai kedoedoekan jang sjah ditengah masjarakat ini. Tidak soeatoe alasan djoega kepada kita oentoe memandangnja dengan edjekan dan tjemooh.” (Kutipan sesuai dengan teks aslinya).

³⁸ Kees Groeneboer, *Op. Cit.*, hal. 224.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Mengenai riwayat singkat C.A. van Ophuijsen, lihat Maman S. Mahayana, “Van Ophuijsen: Peletak Dasar Ejaan Bahasa Indonesia,” dalam *Suara Karya*, 16 Februari 1993.

⁴¹ Dalam hampir semua buku yang membicarakan ejaan van Ophuijsen, tidak ada yang menyinggung nama kedua guru pribumi itu. Dengan demikian, ejaan itu seolah-olah disusun sendiri oleh van Ophuijsen.

⁴² Menurut Denys Lombard (*Op. Cit.*, hal. 164), pemberlakuan ejaan Ejaan van Ophuijsen ini sebelumnya telah melewati perdebatan antara A.A. Fokker dan C. Spat. Usul Fokker yang mendukung pemberlakuan Ejaan van Ophuijsen, akhirnya diterima. Maka sejak 1901 ejaan ini resmi digunakan sampai Maret 1947, ketika Ejaan Soewandi—dikenal juga dengan nama Ejaan Republik—mulai diberlakukan, 1 April 1947.

⁴³ Pembicaraan mengenai Balai Pustaka lebih jauh, periksa K. St. Pamuntjak, “Balai Pustaka Sewadjanja 1908-1942”; (Jakarta: TP, 1948), “Apakah Balai Poestaka” Pengantar bagi lid-lid congres Bestuur Boemipoetera jang ke-III waktoe mengoendjoengi Balai Poestaka; “Bureau voor de Volkslectuur. The Bureau of Popular Literature of Netherlands India, What it is, and what it does”. Ketiga artikel tentang Balai Pustaka ini, sampai kini belum dapat diketahui penerbit dan tahun penerbitannya. Mengenai latar belakang politik kolonial Belanda dalam pendirian Balai Pustaka, periksa Maman S. Mahayana, “Politik Kolonial Belanda di Balik Pertumbuhan Balai Pustaka,” Makalah Seminar Antarbangsa Kesusasteraan Malaysia ke-VII, Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, 10-12 September 2001.

⁴⁴ Nur Sutan Iskandar bekerja di Balai Pustaka sejak tahun 1915. Mula-mula sebagai korektor, kemudian redaktur, dan terakhir menjabat sebagai redaktur kepala sampai ia pensiun. Komentarnya tentang “Peranan Balai Pustaka dalam Perkembangan Bahasa Indonesia” itu disampaikannya dalam suatu pertemuan dengan Ikatan Guru-guru Bahasa Indonesia, kemudian dimuat dalam *Pustaka dan Budaja*, No. 8, Th. II, 1960. Dimuat juga dalam E. Ulrich Kratz (Peny.). *Sumber Terpilih Sejarah Sastra Indonesia Abad XX*. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2000), hal. 5-14.

⁴⁵ Bermula dari gagasan Coenraad Theodore van Deventer tentang “*Een Eeresschuld*” (Utang Budi) yang menggemparkan kalangan politik di Belanda, akhirnya diusulkan agar kebijaksanaan kolonial mulai diarahkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat di tanah jajahan. Pada tahun 1901, Ratu Wilhelmina menyampaikan pidatonya tentang apa yang disebut Politik Etis. Inilah salah satu bagian dari pidatonya itu: “*Sebagai negara Kristen, Negeri Belanda wajib memperbaiki kedudukan hukum orang-orang Kristen pribumi di Kepulauan Hindia, memberikan dukungan kuat pada misi Kristen, dan menanamkan pada seluruh sistem pemerintahan dengan kesadaran bahwa Negeri Belanda mempunyai kewajiban moral terhadap penduduk di kawasan ini.*” Akira Nagazumi, *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia: Budi Utomo 1908-1918* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989), hal. 27-28.

⁴⁶ Modernisasi yang hendak dijalankan di tanah jajahan, seringkali dipersamakan dengan westernisasi (pembayaran). Dalam konteks kebijaksanaan Belanda, pembayaran itu dimaknai sebagai pembelaan.

⁴⁷ I.J. Brugmans, “Politik Pengajaran,” H. Baudet & I.J. Brugmans (Peny.), *Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan*, terj. Amir Sutaarga (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987), hal.182-183.

⁴⁸ Philip G. Albach and Gail P. Kelly (Ed.), *Education and Colonialism* (New York, 1978), hal. 4.

⁴⁹ Groeneboer, *Op. Cit.*, hal. 382.

⁵⁰ Sutan Takdir Alisjahbana, “Bahasa Indonesia,” *Poedjangga Baroe*, No. 5, I, November 1933, hal. 143.

⁵¹ *Ibid.*, hal. 142.

⁵² Groeneboer, *Op. Cit.*, hal. 410.



- ⁵³ Akira Nagazumi, *Op. Cit.*, hal. 121-122.
- ⁵⁴ Nama lain dari Ki Hadjar Dewantara.
- ⁵⁵ Cindy Adams, *Sukarno, An Autobiography as told to Cindy Adams*. Jakarta, 1966; hal. 55. Lihat juga Groeneboer, *Op. Cit.*, hal. 405.
- ⁵⁶ Groeneboer, *Op. Cit.*, hal. 402-403.
- ⁵⁷ Sutan Takdir Alisjahbana, *Op. Cit.*, 158-159.
- ⁵⁸ Sebuah keputusan politik yang mengatasi persoalan etnisitas dan sekaligus mengisyaratkan pembentukan sebuah negara yang bernama Indonesia. Keputusan kongres itu selengkapnya, lihat Lampiran.
- ⁵⁹ Sutan Takdir Alisjahbana, *Op. Cit.*, 154.
- ⁶⁰ Darmawidjaja, "Tentang Bahasa," dalam *Poedjangga Baroe*, No. 12, Th. I, Djoeni 1934, hal. 367-374.
- ⁶¹ Sutan Takdir Alisjahbana, "Pengajaran Bahasa," dalam *Poedjangga Baroe*, No. 10, Th. I, April 1934, hal. 303-305.
- ⁶² Sutan Takdir Alisjahbana dalam resensinya yang dimuat *Poedjangga Baroe*, No. 11, Th. II, Mei 1934, hal. 353-356, mengkritik buku tata bahasa C.A. Mees, *Beknopte Maleische Grammatica*. Dikatakannya bahwa buku itu ditujukan untuk orang Belanda yang belajar bahasa Melayu. Jadi, tidak tepat jika buku itu digunakan untuk orang Indonesia yang belajar bahasa Melayu.
- ⁶³ Sutan Takdir Alisjahbana, "Pengajaran Bahasa," dalam *Poedjangga Baroe*, No. 2, Th. I, Agoestoes 1933, hal. 33-35.
- ⁶⁴ *Ibid.*, hal. 35.
- ⁶⁵ Beberapa majalah, di antaranya, majalah *Wasita* yang dipimpin Ki Hadjar Dewantara (terbit pertama kali di Yogyakarta, 1928), surat kabar *Soeara Oemoem* (terbit pertama kali di Surabaya, 1931), *Poedjangga Baroe* (terbit pertama kali Batavia, 16 Juli 1933) dan *Pedoman Masyarakat* yang dipimpin Hamka dan Yunan Nasution (terbit pertama kali di Medan, tahun 1935), tidak menggunakan bahasa Melayu rendah, melainkan bahasa Indonesia yang standar. Secara serius *Poedjangga Baroe* memuat sejumlah artikel mengenai bahasa Indonesia, seperti "Pengaruh Bahasa Asing kepada Bahasa-Bahasa Indonesia" karya Soeharda Sastrasoewignja, dimuat bersambung dalam *Poedjangga Baroe*, No. 3-4, Th. I, September-Oktober 1933), dan beberapa artikel Alisjahbana dan Sanoesi Pane. Bahkan, artikel Alisjahbana, "Bahasa Indonesia" dimuat dalam edisi khusus *Poedjangga Baroe*, No. 5, I, November 1933. Dari sejumlah artikel itu, tampak bahwa perhatian kaum terpelajar Indonesia terhadap keberadaan dan kemajuan bahasa Indonesia, sangat besar. Artikel Sanoesi Pane yang dimuat *Soeara Oemoem*, Februari 1934, misalnya, berisi usulan agar ejaan bahasa Indonesia menggunakan ejaan "ilmu pengetahuan yang internasional" yang pada dasarnya (hampir) sama dengan ejaan yang berlaku di Semenanjung. Perhatikan ejaan dalam teks berikut yang dikutip seperti aslinya: "Pertukaran ejaan yang diuraikan di atas itu mendekatkan kita kepada Semenanjung, yang menurut ejaan Inggris, yaitu yang chocok dengan ejaan internasional yang kita maksud. ... Alangkah baiknya jika majallah-majallah dan surat-surat kabar kita, apalagi "Pujangga Baru" mulai mengwujudkan maksud itu (Lihat juga *Poedjangga Baroe*, No. 1, II, Djoeli 1934).
- ⁶⁶ Selengkapnya mengenai Kongres Bahasa Indonesia I, lihat Harimurti Kridalaksana, "Kongres Bahasa Indonesia I (1938) dan Kongres Bahasa Indonesia II (1954)" dalam Harimurti Kridalaksana (Ed.), *Masa Lampau Bahasa Indonesia: Sebuah Bunga Rampai* (Yogyakarta: Kanisius, 1991), 235-269.
- ⁶⁷ *Ibid.*, hal. 254.
- ⁶⁸ Maman S. Mahayana, "Sikap Pemerintah Jepang di Bidang Sastra dan Budaya (1942-1945): Studi Kasus Harian *Asia Raja*." Laporan Penelitian (tidak dipublikasikan). Depok: FSUI, 1994.
- ⁶⁹ Ada sekitar 10 surat kabar dan delapan majalah yang diterbitkan pemerintah Jepang. Semua yang berkaitan dengan bidang publikasi ini berada di bawah pengawasan *Jawa Syimbun Kai*, sebuah lembaga sensor pemerintah pendudukan Jepang yang bertanggung jawab atas segala kegiatan yang bersangkutan dengan penerbitan dan pementasan. Periksa Maman S. Mahayana, "Sikap Pemerintah Jepang di Bidang Sastra dan Budaya (1942-1945): Studi Kasus Harian *Asia Raja*." Laporan Penelitian (tidak dipublikasikan). Depok: FSUI, 1994.
- ⁷⁰ Kees Groeneboer, *Op. Cit.*, hal. 433.
- ⁷¹ Kamus ini sebenarnya disusun oleh E. Sutan Harahap dan D. Iken. Jilid pertama terbit tahun 1914 dan jilid kedua terbit tahun 1917. Seluruhnya kemudian diterbitkan lagi tahun 1923.



⁷² Mengenai sejarah perkamusan di Indonesia, periksa Maman S. Mahayana, "Perkamusan di Indonesia," *Pelita*, 9 Oktober 1991; "Kamus Sistem Isyarat Bahasa Indonesia dalam Perkembangan Dunia Perkamusan di Indonesia," *Santun*, No. 2, Juli-September 1994. A. Teeuw dalam "Prestise Bahasa Indonesia," *Kompas*, 5-6 Desember 1990 yang dimuat juga dalam *Indonesia antara Kelisanan dan Keberaksaraan* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1994), hal. 250-262, menyinggung juga perjalanan perkemusan Melayu. Dalam hal itu, sangat mengherankan, Teeuw sama sekali tidak menyinggung *Kitab Arti Logat Melajoe* (1914, 1917; 1923) dan *Kamus Indonesia* (1942) yang disusun E. Sutan Harahap.

⁷³ Siaran Radio berbahasa Belanda terakhir berkumandang pada tanggal 7 Desember 1942. Siaran itu diawali dengan kalimat berikut: "Pada hari ini, kami menyiarkan untuk terakhir kali, pengumuman-pengumuman, warta berita dan komentar harian dalam bahasa Belanda. Mulai besok, tanggal 8 Desember di dalam acara-acara kita, tidak akan ada siaran dalam bahasa Belanda lagi. Groeneboer, *Op. Cit.*, hal. 434.

⁷⁴ Nur Sutan Iskandar, "Peranan Balai Pustaka dalam Perkembangan Bahasa Indonesia" itu disampaikan dalam suatu pertemuan dengan Ikatan Guru-guru Bahasa Indonesia, kemudian dimuat dalam *Pustaka dan Budaya*, No. 8, Th. II, 1960. Dimuat juga dalam E. Ulrich Kratz (Peny.). *Sumber Terpilih Sejarah Sastra Indonesia Abad XX* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2000), hal. 5-14.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Hj. Wan Mohd. Shaghir. "Karya-Karya Klasik Abad 16: Bukti Bahasa Melayu Bahasa Ilmu," dalam *Jurnal Dewan Bahasa*, Februari 1990.
- Adams, Cindy. 1966. *Sukarno, An Autobiography as told to Cindy Adams*. Jakarta
- Albach, Philip G. and Gail P. Kelly (Eds.) 1978. *Education and Colonialism*. New York: Longman.
- Alisjahbana, Sutan Takdir. "Pengadjaran Bahasa" *Poedjangga Baroe*, No. 2, Th. I, Agoestoes 1933.
- . "Bahasa Indonesia." *Poedjangga Baroe*, No. 5, I, November 1933.
- . "Soal Bahasa dalam Sekolah Kebangsaan" *Poedjangga Baroe* No. 10, Th. I, April 1934.
- . "Kedoeoekan Bahasa Melajoe-Tionghoa." *Poedjangga Baroe*, No. 4, Th. II, Oktober 1934.
- . "Berita Boekoe" *Poedjangga Baroe*, No. 11, Th. II, Mei 1934.
- "Apakah Balai Poestaka" Pengantar bagi lid-lid congress Bestuur Boemipoetera jang ke-III waktoe mengoendjoengi Balai Poestaka.
- Asraf dan Usman Awang. Tt. "Memorandum mengenai Tulisan Rumi untuk Bahasa Melayu." *Memoranda Angkatan Sasterawan '50*. Kuala Lumpur: Oxford.
- . 1962. 1987. *Memoranda Angkatan Sasterawan '50*. Kuala Lumpur: Oxford University Press Press. Edisi kedua, Fajar Bakti.
- Brugmans, I.J. 1987. "Politik Pengajaran." H. Baudet & I.J. Brugmans (Peny.). *Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan*. Terj. Amir Sutaarga. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- "Bureau voor de Volkslectuur. The Bureau of Popular Literature of Netherlands India, What it is, and what it does" Darmawidjaja. "Tentang Bahasa." dalam *Poedjangga Baroe*, No. 12, Th. I, Djoeni 1934.
- Groeneboer, Kees. 1995. *Jalan ke Barat: Bahasa Belanda di Hindia Belanda 1600-1950*. Jakarta: Erasmus Taalcentrum.
- Hamzah, A. Wahab. "Sejarah Percetakan Buku Bahasa Melayu," dalam *Pelita Bahasa*, Mac 1991.



- Ishak, Md. Sidin Ahmad. 1998. *Penerbit & Percetakan Buku Melayu 1807—1960*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Iskandar, Nur St. "Peranan Balai Pustaka dalam Perkembangan Bahasa Indonesia." *Pustaka dan Budaya*, No. 8, Th. II, 1960. Dimuat juga dalam E. Ulrich Kratz.
- (Peny.). 2000. *Sumber Terpilih Sejarah Sastra Indonesia Abad XX*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Jamin, Muhammad. 1955. *Sumpah Indonesia Raja*. Bukit Tinggi: Nusantara. Dimuat juga dalam E. Ulrich Kratz. (Peny.). *Sumber Terpilih Sejarah Sastra Indonesia Abad XX*. 2000. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Kridalaksana, Harimurti (Ed.). 1991. *Masa Lampau Bahasa Indonesia: Sebuah Bunga Rampai*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kridalaksana, Harimurti. 1993. *Kamus Linguistik*. Jakarta: Gramedia, Cet. III; Cet. I, 1982.
- Lombard, Denys. 1996. *Nusa Jawa: Silang Budaya: Batas-Batas Pembaratan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lubis, Mochtar. "Perkembangan Bahasa Indonesia," dalam *Horison*, XVIII, 479, November-Desember 1983.
- Mahayana, Maman S. "Latar Belakang Lahirnya Bahasa Indonesia," dalam *Gaung*, No. 3/VII, November 1984.
- . "Cikal-Bakal Bahasa Indonesia," dalam *Suara Karya*, 18 Februari 1985.
- . "Rentang Perjalanan Bahasa Indonesia," dalam *Media Indonesia*, 31 Oktober 1992.
- . "Van Ophujsen: Peletak Dasar Ejaan Bahasa Indonesia," *Suara Karya*, 16 Februari 1993.
- . 1994. "Sikap Pemerintah Jepang di Bidang Sastra dan Budaya (1942-1945): Studi Kasus Harian *Asia Raja*." Laporan Penelitian (tidak dipublikasikan). Depok: FSUI, 1994.
- . 2000. "Majalah Wanita Awal Abad XX (1908-1928)" Laporan Penelitian (tidak dipublikasikan). Depok: Lembaga Penelitian Universitas Indonesia.
- . 2001. *Akar Melayu: Sistem Sastra dan Konflik Ideologi di Indonesia dan Malaysia*. Magelang: Indonesia Tera.
- . "Politik Kolonial Belanda di Balik Pertumbuhan Balai Pustaka," Makalah Seminar Antarbangsa Kesusasteraan Malaysia ke-VII. Bangi: University Kebangsaan Malaysia, 10-12 September 2001.
- Moain, Amat Juhari. "Sejarah Tulisan Jawi," dalam *Jurnal Dewan Bahasa*, November 1991.
- Mulyadi, Sri Wulan Rujati. 1994. *Kodikologi Melayu di Indonesia*. Depok: FSUI.
- Nagazumi, Akira. 1989. *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Niel, Robert van. 1984. *Munculnya Elit Modern Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Pamuntjak, K. Sutan. 1948. "Balai Pustaka Sewadjanja 1908-1942" Jakarta.
- Teeuw, A. "Prestise Bahasa Indonesia," dalam *Kompas*, 5-6 Desember 1990.
- .. "Herman Neubronner van der Tuuk: Perintis Ilmu Bahasa Indonesia," *Kompas*, 13 Agustus 1994.